

**Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan  
Berencana dengan Motif Persembahan Upacara Adat oleh Suku Noaulu  
Maluku Tengah (Studi Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh dan  
Putusan Nomor 25/PID/2006/PT. MAL)**

**Oleh**  
**Thaufik Amirullah<sup>1</sup>, I Nyoman Nurjaya<sup>2</sup>, Bambang Sugiri<sup>3</sup>**  
**Email: thyodrugh@yahoo.com**

**Abstract**

*The position of customary law is the law of life and thrive in the community. However, if customary law is not contrary to the interests of national law it is considered to remain in effect, however, on the contrary if it is considered customary law contrary to positive law or national law, the provisions of the applicable law it is written. Persintuhan between customary law and national law in the context of law enforcement (law enforcement) certainly become part of the discourse of academic study in the field of criminal law in Indonesia. The conflict between the two laws in the domain of formal legal action would have been triggered judicial settlement mechanisms which tend to use aspects of the litigation that has formal characteristics. Subject is deemed reasonable given that adheres to the principles of criminal law, "lex scripta" and "lex certa" in which the principle of "nulla poena nullum delictum sine praevia lege poenali" prohibits enforceability unwritten law because they would threaten the rule of law is promoted as the main base validity of the criminal law. As criminal cases investigated by researchers associated with the practice of premeditated murder committed by tribal motifs Noaulu the action was based on action for the benefit of the customary ceremonial offerings.*

**Key words:** *consideration, judge, customary law, judgment*

**Abstrak**

Tradisi memenggal kepala dan mengambil bagian tubuh manusia (potong kepala) merupakan bagian dari potret tindakan primitif yang dijalankan oleh suku Noaulu untuk persembahan adat. Tindakan tersebut di kenakan sanksi sesuai pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Tulisan ini bertujuan mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana mati dalam perkara pembunuhan berencana dengan motif persembahan upacara adat (potong kepala) oleh Suku Noaulu Maluku Tengah. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaku telah memenuhi unsur pembunuhan berencana sesuai dengan Pasal 340 KUHP, hakim mengendepankan asas *fiksi hukum*, yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*).

---

<sup>1</sup>Mahasiswa, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

<sup>2</sup>Pembimbing Utama, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

<sup>3</sup>Pembimbing Kedua, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang

konsep tradisi memenggal kepala dilakukan berdasarkan *restorative justice* yang dimana penerapannya berupa penyuluhan hukum secara menyeluruh oleh pihak pemerintah pusat maupun daerah. Dalam konteks tersebut pemahaman untuk memberikan alternatif ritual adat mengayau yang memenggal kepala manusia agar secara komprehensif dapat digantikan dengan sarana yang lain semisal adanya upaya penggantian berupa hewan (sapi, kerbau, ataupun kuskus yaitu sejenis binatang hutan yang ada di wilayah pedalaman Suku Noaulu) dan/atau bahan pangan

**Kata kunci:** pertimbangan, hakim, hukum adat, putusan

## Latar Belakang

Perkembangan hukum pidana di Indonesia berjalan sangat pesat ditengah dinamika masyarakat yang semakin responsif dalam mengembangkan khasanah keilmuan di bidang hukum guna menjamin terwujudnya sisi kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.<sup>4</sup> Dalam konteks bernegara, salah satu prinsip penting penjabaran dari desain negara hukum (*rechstaat*) adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak luar untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan kepastian hukum dan keadilan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945, maka prinsip kekuasaan kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi tercapainya tujuan dan cita-cita Negara Republik Indonesia.

Kedudukan hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Namun apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan hukum nasional maka dianggap tetap berlaku, namun demikian sebaliknya jika hukum adat itu dianggap bertentangan dengan hukum positif atau hukum nasional, maka ketentuan hukum tertulislah yang berlaku. Persintuhan antara hukum adat dan hukum nasional dalam konteks penegakan hukum (*law enforcement*) tentulah menjadi bagian dari diskursus akademik kajian dalam bidang ilmu hukum pidana Indonesia.

---

<sup>4</sup>Suharto, dan Junaidi Efendi, 2010, **Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan**, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm 25-26

Konflik hukum diantara keduanya dalam ranah tindakan hukum formil tentulah memicu terjadinya mekanisme penyelesaian hukum yang cenderung menggunakan aspek litigasi yang memiliki karakteristik formal. Perihal tersebut dipandang rasional mengingat bahwa hukum pidana menganut azas, “*lex scripta*” dan “*lex certa*” dimana asas, “*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*” melarang keberlakuan hukum yang tidak tertulis karena dianggap akan mengancam kepastian hukum yang diusung sebagai landasan utama keberlakuan hukum pidana.<sup>5</sup>

Sebagaimana kasus pidana yang dikaji oleh peneliti terkait dengan praktek pembunuhan berencana yang dilakukan oleh warga suku Noaulu dengan motif tindakan tersebut didasarkan atas tindakan untuk kepentingan upacara persembahan adat. Hal ini seperti yang terdapat pada salah satu suku di Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yaitu suku Noaulu. Salah satu suku yang hidup di Petuanan Negeri Sepa, merupakan salah satu suku terasing dan primitif di Pulau Seram, tepatnya di Dusun Bonara, yang berjarak 35 Km dari Pusat Kota Kecamatan. Upacara persembahan adat dimaksud oleh masyarakat Noaulu dikenal sebagai tradisi “*Mengayau*” (memenggal) kepala manusia untuk ritual adat. Bagi sebagian masyarakat Maluku, khususnya di pulau Seram suku Noaulu dipandang sebagai kelompok orang terbelakang (primitif). Bahkan ada keengganan orang luar masuk dan berbaur dengan komunitas adat suku Noaulu.

Akibat perbuatannya itu, tiga warga suku Noaulu yang merupakan komunitas adat tertinggal di Pulau Seram berhadapan dengan ancaman hukum pidana dengan pertimbangan bahwa perbuatan yang dilakukan memenuhi kualifikasi delik pembunuhan berencana. Pada akhirnya ketiga warga dimaksud divonis hukuman mati oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Masohi sesuai dengan Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh Mereka adalah Patti Sounawe, Nusy Sounawe, dan Sekeranane Soumorry. Sementara tiga lainnya divonis hakim hukuman penjara seumur hidup masing-masing Saniyawuu Sounawe, Tohonu Somory, dan Sumon Sounawe.

---

<sup>5</sup>Eva Achzani Zulfa, 2013, **Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Proceeding Seminar Arah Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia**, Surabaya: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI hlm 5

Para pelaku dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan secara berencana, sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Adapun bunyi Pasal 340 KUHP:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Sementara itu untuk pelaku yang turut serta dikenakan ketentuan Pasal 55 ayat 1 (1) KUHP yang mana Pasal tersebut menyatakan:

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

Berdasarkan vonis diatas maka Raja Noaulu dari suku Nuane, Sahune Matoke, mengatakan tindakan yang dilakukan warganya disebabkan karena ketidaktahuannya akan hukum Pidana yang berlaku di Indonesia.<sup>6</sup> Namun demikian pasca penetapan vonis, tim kuasa hukum melakukan upaya banding yang mana dalam Putusan Banding yang dituangkan dalam Perkara Pidana Banding Nomor 25/PID/2006/PT. MAL merubah status hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup.

Beranjak dari penjelasan diatas maka pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum public tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu *kolektiviteit* dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu dating dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup> Akan tetapi menurut penulis penjatahan pidana terhadap pelaku pemotongan kepala mestinya ada pertimbangan, mengingat suku Noaulu adalah sekelompok warga yang masih terisolasi, bahkan perbuatan pemenggalan kepala yang dilakukan oleh Pati Sounawecs, mereka tidak mengetahui jika perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan hukum pidana sebagaimana disebut di atas adalah merupakan sumber hukum tertulis atau hukum yang sifatnya modern,

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 58

<sup>7</sup> M. Abdul, Kholiq, 2002, **Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana**, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hlm 15

namun selain hukum tertulis itu ada sumber hukum tidak tertulis yang merupakan pedoman hidup masyarakat adalah keberlakuan hukum adat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis mengambil rumusan permasalahan sebagai berikut: (1) Mengapa hakim menjatuhkan sanksi pidana mati sesuai Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh dalam perkara pembunuhan berencana dengan motif persembahan upacara adat (*Mengayau*) oleh Suku Noaulu Maluku Tengah dan (2) Mengapa hakim tidak mempertimbangkan nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ?

Jenis Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>8</sup> Metode penelitian normatif (*normative legal research*) adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>9</sup> Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga sering disebut dengan penelitian doktrinal (*doctrine research*), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.<sup>10</sup>

Penulisan ini berorientasi pada pengkajian tentang pertimbangan hukum hakim dalam putusan tindak pidana terhadap pembunuhan berencana dengan motif persembahan adat (*mengayau*) oleh warga Noaulu di Maluku Tengah, dari segi ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan serta mengaitkan beberapa referensi yang telah ada baik dalam bentuk buku maupun sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan objek kajian.

Dalam menelaah isu hukum (*legal issue*) pendekatan penelitian yang digunakan adalah pertama pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm 295

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 57.

<sup>10</sup>Bismar Nasution, 2007, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum**, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 18 Februari 2003), hlm. 1 dalam Ifranso Pasaribu, **Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Analisis Terhadap Pembebanan Pembuktian dan Sanksi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001)**, Tesis, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2007), hlm. 44.

undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum di bidang kekuasaan kehakiman dan dalam konteks persentuhan hukum adat dan hukum pidana nasional.<sup>11</sup> Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun klasifikasi bahan hukum sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; Surat Dakwaan No. PDM-45/MSOH/10/2005; Putusan Nomor. 87/PID.B/2005/PN.MSH; dan Putusan Nomor. 25/PID/2006/PT.MAL.

## **Pembahasan**

### **A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.MSH**

Proses peradilan merupakan bagian dari upaya untuk mencari keadilan serta dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum bagi segenap warga negara yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ranah hukum pidana serangkaian tindak yang menyerang keselamatan jiwa dan raga dipandang sebagai bentuk perbuatan yang diancam pidana karena dianggap memenuhi unsur delik sebagaimana amanat ketentuan undang-undang yang berlaku. Rangkaian pemeriksaan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan ppidanan di Pengadilan merupakan bagian integral dari upaya penegakan hukum (*law enforcement*) dalam rangka pembuktian fakta-fakta hukum di persidangan (*judex factie*).

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hlm 93

<sup>12</sup>Ibid, hlm 94.

Enam warga Noaulu yang menjadi target tersangka diciduk polisi dengan pengawalan satu peleton brimob bersenjata lengkap. Saat penangkapan, tidak ada perlawanan sama sekali. Proses hukum pidana berjalan. Tiga diantara pelaku divonis hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Masohi yakni Patti Sounawe, Nusy Sounawe dan Sekeranane Soumory. Sementara Saniayu Sounawe, Tohonu Soumory dan Sumon Sounawe divonis oleh hakim dengan hukuman penjara seumur hidup. Berdasarkan kronologi dimaksud maka Majelis Hakim mengadili dan menjatuhkan pidana dengan mengacu pada ketentuan Pasal 340 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi delik sebagai berikut:

**a) Unsur “Dengan Sengaja”**

Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah setiap perbuatan yang akibat dari perbuatan tersebut diketahui atau disadari oleh si pelaku delik. Bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Keterangan saksi-saksi diantaranya saksi Sadrak Nuniari, Saniyawu Sounawe, Tohonu Somori alias Unu dan saksi Sumon Sounawe alias Mon yang keterangannya telah dibenarkan oleh para terdakwa, alat bukti surat, keterangan para terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya dan adanya barang bukti, sehingga diperoleh fakta bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekitar bulan Juli 2005 sesuai dengan perintah saksi Sumon Sounawe alias Mon bahwa untuk pelaksanaan upacara adat Sounawe harus ada dua kepala manusia.
- b) Bahwa kemudian setelah tubuh kedua korban tersebut terpotong-potong menjadi beberapa bagian selanjutnya dihanyutkan di aliran kali Ruata, kemudian para terdakwa bersama-sama dengan saksi Saniyawu Sounawe dan Tohonu Somory pergi dengan jalan kaki meninggalkan tempat kejadian dan membawa dua kepala, jantung, lidah, dan jari-jari yang dimasukkan ke dalam tas plastik rinjani dan sesampainya di belakang kampung Nuanea para terdakwa bersama-sama dengan saksi Saniyawu Sounawe dan Tohonu Somory menguliti kepala korban tersebut hingga bersih, jari-jari ditusuk dengan bambu (sate), jantung, lidah kemudian dipanggang di atas api hingga kering, kemudian terdakwa II.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa untuk mendapatkan dua kepala korban adalah dengan cara harus membunuh kedua korban, dan hal tersebut tetap dilakukan para terdakwa. Dengan demikian unsur “dengan sengaja” disini telah terpenuhi.

**b) Unsur “Direncanakan Terlebih Dahulu”**

Bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah perbuatan yang akan dilakukan diperlukan suatu jangka waktu tertentu baik singkat maupun panjang bagi si pelaku untuk merencanakan atau mempertimbangkan lagi niatnya.

**c) Unsur “Menghilangkan Nyawa Orang Lain”**

Bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa orang lain adalah aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa yang menyebabkan orang lain yaitu korban Bonefer Nuniari dan Brusly Lekransi kehilangan nyawa atau meninggal dunia.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim memandang bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan bahwa sifat dari perbuatan terdakwa tersebut sangat kejam dan keji karena tega menghilangkan 2 (dua) nyawa orang lain yang sama sekali tidak berdosa. Dalam pandangan legal positifis penulis berpandangan bahwa tentulah tindakan delik pembunuhan berencana sebagaimana dipaparkan memang membuktikan bahwa pelaku telah melanggar ketentuan pidana.

Dengan demikian dalam penerapan hukumnya harus dibuktikan hubungan antara tindakan seseorang dengan suatu tindakan atau peristiwa untuk dapat memenuhi unsur pembunuhan berencana. Demikian halnya dengan mengacu pada penerapan asas *culpabilitas* yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*afwijzigheid van alle schuld*). Adapun ajaran kesalahan (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimana terurai bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri dari adanya unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) ataupun kealpaan (*culpa*) yang dimaksud dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu



perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

Penulis berpandangan bahwa dalam konteks ajaran hukum pidana maka unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan kealpaan atau disebut culpa dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*).<sup>13</sup> Dengan demikian, penulis berpendapat merupakan suatu keniscayaan yang patut disadari bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang akan memiliki dampak hukum sehingga setiap perbuatan dimaksud akan dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Pertanggung jawaban pidana terhadap pembunuhan sebagaimana dimaksud merupakan konsekuensi logis bahwa rumusan delik pembunuhan memenuhi kualifikasi sebagaimana dirumuskan di dalam KUHP.

#### **B. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 25/Pid/2006/PT. MAL**

Berdasarkan uraian diatas maka putusan pengadilan tingkat pertama belum dianggap final karena secara konstruksi yuridis belum bersifat *inkracht*.<sup>14</sup> Berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu putusan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah:<sup>15</sup>

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding setelah waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir, sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) jo. Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), kecuali untuk putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechts vervolging*), dan putusan

---

<sup>13</sup>Marpaung, Leden, 2008, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm 8

<sup>14</sup>Di dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

<sup>15</sup>Lihat Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

pemeriksaan acara cepat karena putusan-putusan tersebut tidak dapat diajukan banding (lihat Pasal 67 KUHAP).

- b. Putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa (Pasal 245 ayat (1) jo. Pasal 246 ayat (1) KUHAP).
- c. Putusan kasasi

Dalam aspek yuridis dimaksud tim kuasa hukum suku Noaulu mengajukan banding dengan pertimbangan hukum yang diajukan oleh Samson Attapary bahwa tersangka menyebut vonis hakim sebagai sebuah ironi, bila pertimbangan hakim hanya mengacu pada hukum positif. Fakta persidangan membuktikan mereka tidak tahu konsekuensi hukum positif bila membunuh sesama manusia.<sup>16</sup>

Dalam pertimbangan hukum hakim terungkap pula hal-hal yang dianggap memberatkan antara lain *Pertama*, Perbuatan terdakwa-terdakwa sangat keji. *Kedua*, Perbuatan terdakwa tidak memperhatikan keberadaan manusia sebagai makhluk yang beradap. Selain terdapat alasan pemberat Majelis hakim juga mengungkapkan hal-hal yang dianggap meringankan antara lain *Pertama*, Terdakwa-terdakwa menyatakan terusterang, sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, *Kedua* Terdakwa-terdakwa masih muda bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dimasa mendatang, *Ketiga* Terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum, *Keempat* Terdakwa-terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan pertimbangan diatas amar putusan hakim pengadilan tinggi menyatakan menerima permintaan banding dari kuasa hukum Terdakwa-terdakwa yang oleh karenanya dilakukan perbaikan Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 9 Februari 2006 Nomor: 87/PID.B/PN.MSH sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa sehingga isinya berbunyi sebagai berikut *Pertama*, Menghukum terdakwa-terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara “seumur hidup”. *Kedua*, menguatkan putusan Pengadilan

---

<sup>16</sup>Terungkap dalam persidangan bahwa sang hakim menanyakan terdakwa apa yang kamu rasakan setelah membunuh orang? Jawaban dari dua terdakwa tersebut ialah saya merasa bangga bisa memotong kepala manusia dan jika kami tidak melakukan itu kami bisa sakit dan mati, itulah jawaban terdakwa dengan kepolosan nya akan pengetahuan hukum yang sangat minim di Suku Noaulu.

Negeri Masohi tersebut untuk selebihnya. *Ketiga*, Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan; *Keempat* Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa-terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Beranjak dari pemahaman atas putusan diatas penulis memandang bahwa pada satu sisi penulis menghormati Putusan pengadilan yang telah dikeluarkan. Penulis mensitematisasi bahwa dalam proses penjatuhan Putusan hakim pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding menggunakan logika hukum dalam hal ini secara konstruksi berfikir hakim bertendensi pada pola berfikir hukum secara *legal positivist* dengan mengedepankan asas fiksi hukum sehingga memandang ketidak tahuan pelaku atas dampak perbuatan membunuh yang dilakukan telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang sehingga atas perbuatan dimaksud diancam dengan pidana.<sup>17</sup>

Dalam konsep hukum keberlakuan asas fiksi hukum menyatakan, bahwa setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan. Dengan kata lain, fiksi hukum menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Ketidaktahuan pelaku pembunuhan (warga suku Noaulu) atas undang-undang, dengan demikian, tidak dapat dimaafkan (*ignorantia jurist non excusat*). Sehingga implementasi asas fiksi hukum bisa dibilang merupakan asas yang mengandung alasan pembenar dari negara buat memaksakan segala sesuatu termasuk yang sewenang-wenang kepada rakyatnya.

---

<sup>17</sup>Perlu dipertimbangkan pula ketentuan Undang-Undang Drt No.1 tahun 1951 yang berbunyi Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materiil pidana sipil yang sampai kini berlaku untuk kaula-kaula daerah Swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili oleh Pengadilan Adat, ada tetap berlaku untuk kaula-kaula dan orang itu, dengan pengertian: bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang tidak lebih dari tiga bulan penjara / atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan yang terhukum, bahwa, bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu menurut fikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukumannya pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut faham hakim tidak selaras lagi dengan zaman senantiasa mesti diganti seperti tersebut di atas, dan bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingnya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingnya yang paling mirip kepada perbuatan pidana itu

Sehingga penggunaan asas dimaksud dipandang sebagai sebuah asas yang dianggap *taken for granted* dari sistem hukum Indonesia.

Maka, sehubungan dengan hal ini, dapatlah dibenarkan berlakunya doktrin *ignoratio iuris*. Ialah doktrin yang menyatakan tak ada seorangpun yang boleh mengingkari berlakunya hukum undang-undang dengan dalih bahwa ia belum pernah membaca dan mengetahui isi materi undang-undang tersebut. Penolakan terhadap dalih ini berangkat dari suatu alasan bahwa walaupun seseorang itu tidak pernah membaca dan mengetahui isi undang-undang tentang suatu perkara, dia tak akan bisa mengelak untuk mengatakan bahwa ia juga tak mengenal norma-norma sosial tentang perkara yang dibentuk sebagai hukum Undang-Undang.

Pengadilan sebagai suatu lembaga adalah merupakan tempat orang-orang mencari keadilan. Dalam proses peradilan, hakim dalam memutuskan kasus yang diperiksanya meskipun sama kasusnya tetapi belum tentu sama keputusannya antara hakim satu dengan lainnya, karena untuk mengambil keputusan hakim dipengaruhi oleh dua hal yaitu rasio dan *intuisi* (perasaan). Perasaan adil setiap hakim tidaklah sama karena pengaruh dalam kehidupan mereka dalam dunia sosial atau yang mereka alami dalam kehidupan di sekitarnya.

### **C. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim yang tidak Mempertimbangkan Nilai Hukum Dan Rasa Keadilan Yang Hidup Dalam Masyarakat Sesuai Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**

Kedudukan hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam suatu proses persidangan tentu tidak terlepas dari kapasitas hakim dalam menggunakan penalaran hukum yang disistematisasi dengan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menggali keterangan saksi-saksi, memeriksa barang bukti bahkan jikalau dipandang penting untuk menjamin keyakinan hakim dipandang perlu pula untuk menghadirkan keterangan ahli untuk memberikan pendapat hukum dalam persidangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya.

Dalam perkara pembunuhan dengan motif untuk melaksanakan tradisi adat, "*Mengayau*" sebagaimana telah dijelaskan dimuka maka seharusnya

diperlukan adanya keterangan ahli yang memiliki kapasitas hukum dan sejarah tradisi adat sangat penting agar dasar-dasar pertimbangan ahli dapat menjelaskan secara paripurna terkait dengan persintuhan hukum pidana nasional dan tradisi adat yang oleh karenanya pertimbangan tersebut masuk dalam putusan hakim.

Berdasarkan penjelasan di muka terdapat kesesuaian antara aspek tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas keadilan bagi Komunitas Adat Tertinggal dengan Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.MSH dan Putusan Nomor 25/PID/2006/PT.MAL. Dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis maka kelahiran suatu Putusan pengadilan merupakan mahkota yang memiliki marwah kewibawaan bagi lembaga peradilan dalam menjalankan tugas konstitusionalnya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Terhadap Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.MSH dan Putusan Nomor 25/PID/2006/PT.MAL penulis memandang bahwa dari aspek legal formal memang hakim dalam memutus perkara telah memenuhi kualifikasi delik pembunuhan berencana sebagaimana dirumuskan di dalam ketentuan Pasal 340 KUHP. Meskipun dihadapkan pada kondisi yang kompleks bahwa hakim secara mandiri dan independen memiliki hak konstitusional untuk memutus perkara yang sekaligus bersejalan dengan tata nilai bahwa hakim dalam memutus perkara wajib menggali rasa keadilan dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam tradisi pemikiran *legal-positivism*, yang banyak dianut oleh Negara demokrasi sekarang ini, hukum dikonsepsikan sebagai produk legislasi. Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan melalui proses legislasi nasional. Hukum berlaku, semata-mata karena telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah isinya memuat nilai-nilai keadilan atau tidak. Dalam sistem ini, pelaku hukum (hakim dan birokrasi), sebagaimana doktrin dalam *analytical jurisprudence*, hanya bertugas sebagai terompet atau corong undang-undang.

Demikian halnya dalam perspektif nilai-nilai fundamental Pancasila khususnya sila kedua yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” maka dalam konstruksi hukum positif putusan hakim dari aspek legal formal telah tepat

dalam menerapkan hukum sebagai bentuk argumentasi yuridis atas pertanggung jawaban pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan berupa memenggal kepala manusia yang dilakukan untuk kepentingan menjalankan tradisi adat yang dalam hal ini dijalankan oleh komunitas adat suku Noaulu. Perbuatan dimaksud tentulah tidak memiliki alasan pemaaf dari sisi pertanggung jawaban pidana meskipun dijalankan dibawah sadar dengan tujuan untuk kepentingan tradisi adat.

Namun demikian dalam ranah pengembangan dan pencerdasan hukum bagi masyarakat untuk mengkases keadilan (*access to justice*) terdapat pertimbangan sosiologis-antropologis yang cenderung dikesampingkan oleh hakim dalam memutus perkara dimaksud. Dilihat dari sudut pandang antropologis, maka hukum adat seperti dimaksud di atas, dapat memenuhi fungsi idiologikal hukum seperti yang disyaratkan oleh nilai budaya, karena aturan-aturannya dirasakan dan diterima oleh masyarakatnya, sebagai pola tingkah laku yang sesuai (*proper*) untuk mengontrol tingkah laku masyarakat. Dan dari sifatnya yang dinamis, hukum adat senantiasa responsif terhadap perubahan di sekelilingnya.

Hukum adat sebagai hukum hidup, digambarkan oleh Vinogradoff seperti dikutip Satjipto Rahardjo<sup>18</sup>, bahwa hukum lahir serta merta dari kandungan masyarakat, dari praktik-praktik yang secara langsung bertumbuh dari konvensiensi, baik dari masyarakat maupun perorangan. Adat istiadat, kebiasaan sebagai tingkah laku (*rule of behaviour*) mendapat sifat hukum pada ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya ketika terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau ketika petugas hukum bertindak mencegah pelanggaran peraturan itu.

Satjipto Rahardjo, dalam bukunya *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya* mengingatkan pada aparaturnya penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim), ”*Negara hukum di tahun 1945 itu ibarat rumah yang belum selesai benar. Negara hukum ada bukan untuk negara hukum itu sendiri, melainkan untuk menjadi rumah yang membahagiakan bagi penghuninya. Negara hukum Indonesia perlu*

---

<sup>18</sup>SatjiptoRahardjo sebagaimana dikutip oleh Simarmata ,Rikardo, 2006, **Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia**. Regional Initiative on Indigenous Peoples Rights and Development (RIPP) UNDP Redional Center in Bangkok hlm 5

*terus menerus menegaskan identitasnya yang mungkin belum tuntas dipikirkan oleh bapak kemerdekaan kita*".<sup>19</sup>

Pada konteks tersebut menurut Swidorski, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam artikelnya yang berjudul "*Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan*" menyatakan, "*Law, legal institution, and legal discourse are part of the power and hegemony in a society and are resisted.*" Kemenangan elite yang dominan akhirnya menjadikan gagasan mereka tentang hukum menjadi arus utama pemikiran (*Mainstream legal theory*) atau yang mapan. Tetapi, seperti dikatakan oleh Swidoski, dominasi dan kemapanan tersebut tidak aman dari perlawanan oleh pikiran lain.<sup>20</sup>

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka praktek tradisi adat memenggal kepala manusia , "*Mengayau*" bagi kelompok suku Noaulu yang telah lama berkembang dalam aras peradaban manusia tentu menempatkan suatu komunitas masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang berbeda dalam memandang keberlakuan hukum adat yang secara karakteristik bersifat tidak tertulis akan tetapi dijalankan dengan prinsip keyakinan bahwa tradisi tersebut merupakan warisan nenek moyang dan/atau leluhur sehingga wajib hukumnya untuk dijalankan. Sama halnya dengan tradisi perang dan pertumpahan darah yang berlaku di wilayah komunitas adat terpencil. Tatkala itu sudah menjadi tradisi turun temurun maka tindakan membunuh dalam perang dianggap sebagai suatu kebanggaan yang tentu secara psikologis akan bertolak belakang dengan rumusan norma perlindungan terhadap tubuh nyawa sebagaimana termaktub di dalam KUHP.

Karakteritik *religio magis* terlihat jelas sekali pada upacara-upacara adat tradisi Mengayau dimana lazimnya diadakan sesajian yang ditujukan pada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu bantuannya. Juga acara selamatan pada setiap kali menghadapi peristiwa penting, seperti: kelahiran, khitanan, perkawinan, mendirikan rumah, pindah rumah sampai kematian.

---

<sup>19</sup>SatjiptoRahardjo, **Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya**, Yogyakarta: LengePrintika, hlm. 13.

<sup>20</sup>SatjiptoRahardjo, "**Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan**" Makalah, tidakditerbitkan, Semarang, 2009. hlm 1

Berdasarkan uraian diatas maka dalam ranah kajian akademis hukum adat, mengenal hukum adat pidana, sering disebut “pelanggaran adat” atau *adat delicten recht*. Hukum adat pidana merupakan hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan adat, dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, karena mengganggu keseimbangan kosmis masyarakat. Terhadap pelaku pelanggaran diberikan reaksi atau koreksi atau sanksi adat oleh masyarakat melalui fungsionaris adatnya.

Dalam konteks menakar keadilan bagi Komunitas Adat Tertinggal (Suku Noaulu) maka tidak semata-mata mengedepankan asas fiksi hukum akan tetapi juga menempatkan secara proporsional terhadap keberlakuan asas publisitas hukum.<sup>21</sup> Kewajiban untuk memublikasikan peraturan ke sebanyak mungkin warganegara dengan sendirinya gugur tatkala Pemerintah secara resmi menempatkannya dalam Lembaran Negara.

Asas fiksi hukum yang kini berlaku mesti segera diganti dengan asas publisitas yang mensyaratkan agar masyarakat memiliki akses dalam memperoleh informasi hukum. Asas publisitas menunjukkan, adalah kewajiban pemerintah untuk memublikasikan peraturan perundang-undangan, terutama yang sifatnya mengikat secara umum, agar tercipta masyarakat yang patuh terhadap hukum. Asas publisitas semacam inilah yang ditekankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Konvensi Hukum Nasional tahun 2008. Kalau warga yang buta hukum diseret ke pengadilan padahal ia benar-benar tak mengerti hukum, aparat penyelenggara negara sesungguhnya turut bersalah. Aparat jangan sampai malah

---

<sup>21</sup>Asas publisitas dalam arti materiel menunjukan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan peraturan perundang-undangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum, kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahaminya sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Secara historis lahirnya asas publisitas berawal dari kebiasaan Raja Hamura bidari Babylonia (kira-kira pada tahun 2000 SM) yang mendirikan tugu peringatan di tempat-tempat public setiap kali dia mengeluarkan hukum dan peraturan yang baru bagi rakyatnya. Dalam tugu peringatan yang kemudian dikenal dengan Kode Hamurabi itu tertera perintah-perintah raja Hamurabi yang dipahatkan di permukaan tugu tersebut, sehingga semua orang dapat membacanya, mengetahuinya, untuk kemudian mematuhi. Kode Hamurabi merupakan kerifan dari kebudayaan di masa silam yang menekankan pentingnya aspek publisitas dalam penegakan hukum. Penempatan Kode Hamurabi di tempat-tempat publik yang memungkinkan akses masyarakat melihatnya menunjukan hal tersebut. Jangan mengharapkan masyarakat mematuhi hukum yang dibuat jika penguasa tidak berusaha mempublikasikan hukum atau peraturan yang dibuat itu kepada masyarakat.



membiarkan ketidaktahuan rakyat atas hukum. Apalagi menjebak mereka supaya dipidana atas ketidaktahuan mereka.

Atas dasar pertimbangan diatas maka keterangan ahli dalam persidangan yang kemudian dari keterangan tersebut dirumuskan di dalam putusan hakim sangat diperlukan meskipun pada akhirnya hakim memiliki independensi dan kemerdekaan dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pandangan hukum progresif, pelaku hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan krusial dalam hal hubungan manusia, termasuk keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas; baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam konteks ini, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan). Hukum progresif yang menghendaki pembebasan dari tradisi keterbelengguan, memiliki kemiripan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*).<sup>22</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dalam ranah pemikiran hukum terhadap penyelesaian perkara yang didalamnya mengandung unsur persintuhan antara hukum adat dan hukum pidana nasional dapat didorong ke arah permusyawaratan sebagai upaya untuk mewujudkan gagasan *restorative justice*. Beranjak dari penjelasan dimaksud penulis berpandangan bahwa terhadap tradisi adat Mengayau tidak ada jaminan bahwa penerapan sanksi hukum pidana dengan sendirinya akan menghentikan tradisi adat memenggal kepala manusia (*mengayau*) yang dijalankan oleh suku Noaulu akan berhenti. Secara kasuistis kejadian sebagaimana dimaksud sudah pernah terjadi pada kurun waktu tahun 1993 dan dilakukan oleh komunitas adat yang sama. Dalam perspektif psikologis pelaku pembunuhan pun mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan merupakan suatu kebanggaan sebagaimana diungkapkan pelaku dimuka persidangan baik dalam tingkat pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

---

<sup>22</sup>Menurut Satjipto Rahardjo, Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan Satjipto Rahardjo, 2009, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Yogyakarta: Genta Publishing, Yogyakarta, hlm xiii.

Dalam konteks pemahaman terhadap persepsi peradilan yang sedang berjalan maka sistem pemidanaan seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, *over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masiv-nya jumlah tahanan narapidana. Lapas seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana tersebut, malah seolah-lapas telah bergeser fungsinya sebagai *academy of crime*, tempat dimana para narapidana lebih “diasah” kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana.

Terhadap penyelesaian kasus sebagaimana dijelaskan di muka maka dipandang penting bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) maupun pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menjalankan model penyelesaian mediasi penal sebagai bentuk alternatif penyelesaian persintuhan hukum adat dan hukum pidana nasional. Dalam ranah sistem hukum pidana Di Indonesia dengan kewenangan seperti tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sesungguhnya menempatkan penegak hukum sebagai seorang “*judex mediator*” artinya ia harus dapat menjadi penghubung antara pihak yang bertikai. Selanjutnya, dia juga harus dapat menjadi jembatan antara pihak-pihak tersebut dengan masyarakat, serta dapat menimbang beragam kepentingan, norma, dan nilai yang ada di dalam masyarakat itu.

Dalam konteks tersebut pemahaman untuk memberikan alternatif ritual adat mengayau yang memenggal kepala manusia agar secara komprehensif dapat digantikan dengan sarana yang lain semisal adanya upaya penggantian berupa hewan (sapi, kerbau, ataupun kuskus yaitu sejenis binatang hutan yang ada di wilayah pedalaman Suku Noaulu) dan/atau bahan pangan. Hal ini dimaksudkan agar secara berkelanjutan terjadi kesepakatan antara pemangku adat (Raja Suku Noaulu dan/atau tokoh adat) dengan masyarakat sekitar Suku Noulou untuk mentaati kesepakatan yang ada dengan itikad baik (*good faith*).

Penyelesaian kasus hukum sebagaimana dimaksudkan di atas diarahkan dalam rangka mewujudkan ide tentang *restorative justice* yang merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan

keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

### Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan diatas maka dalam dapat disimpulkan beberapa poin penting antara lain:

- a) Pertimbangan hukum hakim menjatuhkan sanksi pidana mati dan seumur hidup sesuai Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.Msh dan Putusan Nomor 25/PID/2006/PT. MAL di dasarkan pada aspek pemenuhan kualifikasi delik pembunuhan berencana sebagaimana dirumuskan di dalam ketentuan Pasal 340 KUHP serta penekanan pada asas fiksi hukum yang memandang bahwa setiap orang dianggap tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Ketidaktahuan pelaku pembunuhan (warga suku Noaulu) atas undang-undang dengan demikian tidak dapat menjadikannya seagai alasan pemaaf (*ignorantia jurist non excusat*) sehingga pelaku tetap dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana. Namun demikian penggunaan penafsiran sebagai pengaruh perkembangan masyarakat pada dasarnya membuka peluang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum secara progresif. Penemuan hukum secara progresif tidak terlepas dari keinginan hati nurani untuk menegakkan keadilan dengan berpijak pada nilai-nilai hukum di masyarakat. Praktik pengadilan di Indonesia, menunjukkan mulai berkembangnya cara-cara penerapan hukum yang progresif, namun tradisi *legal-positivism* masih menjadi *mainstream* para hakim.
- b) Konsistensi pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 87/Pid.B/2005/PN.MSH dan Putusan Nomor 25/PID/2006/PT. MAL selaras dengan aspek *legal positivism* rumusan delik pembunuhan berencana namun demikian keberlukaan asas fiksi hukum yang digunakan oleh hakim dipandang tidak proporsional mengingat bahwa dalam konteks tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak atas keadilan (*acces to justice*) karena tidak menjadikan keberlukaan asas publisitas hukum sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Dalam rangka membangun pembinaan hukum yang mencerdaskan pengetahuan masyarakat khususnya warga suku Noaulu.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Kholiq, M.Abdul, 2002, **Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana**, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Leden, Marpaung, 2008, **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika,
- Nasution, Bismar, 2007, **Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum**, Makalah disampaikan pada dialog interaktif tentang penelitian hukum dan hasil penulisan hukum pada majalah akreditasi, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 18 Februari 2003).
- Rahardjo, Satjipto, 2006, **Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat Di Indonesia**. Regional Initiative on Indigenous Peoples Rights and Development (RIPP) UNDP Redional Center in Bangkok.
- \_\_\_\_\_, 2006, **Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya**, Yogyakarta: Lenge Printika.
- \_\_\_\_\_, 2009, **Hukum Progresif Berhadapan dengan Kemapanan**, Makalah, tidak diterbitkan, Semarang: Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 2009, **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Yogyakarta: Genta Publishing.
- SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji, 2009, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Cetakan ke-11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharto, dan Junaidi Efendi, 2010, **Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan**, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zulfa, Eva Achzani, 2013, **Eksistensi Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia**, Proceeding Seminar Arah Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia, Surabaya: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang **Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil**;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang **Kekuasaan Kehakiman**;
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang **Peradilan Umum**;
- Surat Dakwaan No. PDM-45/MSOHI/10/2005;
- Putusan Nomor. 87/PID.B/2005/PN.MSH; dan
- Putusan Nomor. 25/PID/2006/PT.MAL;